

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PENDUDUK, PENGELUARAN
PEMERINTAH, DAN RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA**

JURNAL



Oleh:

Nama : Siska Damayanti

Nomor Mahasiswa : 14313315

Program Studi : Ilmu Ekonomi


FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PENDUDUK, PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI, DAN RASIO KETERGANTUNGAN PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA

Siska Damayanti

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
(siskadamyanti373@yahoo.co.id)

Abstrak: Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, dan Rasio Ketergantungan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh pengeluaran rata-rata penduduk per kapita sebulan, pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2008-2013 dengan observasi di 33 Provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Dari penelitian ini diketahui bahwa pengeluaran rata-rata penduduk per kapita sebulan, pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan, dan rasio ketergantungan daerah berpengaruh terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Kata Kunci: IPM, pengeluaran penduduk, APBD bidang kesehatan, APBD bidang pendidikan, rasio ketergantungan daerah

PENDAHULUAN

Sampai pada tahun 1960-an, tolok ukur pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2016). Keberhasilan pembangunan nasional diukur berdasarkan pertambahan jumlah output yang dapat dihasilkan sebuah negara yang dikuantifikasi dengan PDB. Namun ternyata, hal ini tidak terjadi pada negara-negara

berkembang. Barulah pada tahun 1960-an konsep perkembangan ekonomi ini tidak hanya dilihat dari pertambahan jumlah output yang dapat dihasilkan oleh sebuah negara (PDB), tapi juga diperluas dengan melihat aspek peningkatan kualitas hidup para warga negara dari waktu ke waktu.

PBB melalui salah satu organisasi anakannya, UNDP, pada tahun 1990 untuk pertama kalinya menerbitkan laporan tahunan yang berisi pemeringkatan negara-negara di dunia untuk mengukur capaian suatu negara dalam membangun sumberdayanya. HDI (*Human Development Index*) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu standar yang telah digunakan oleh semua negara di dunia. Indeks ini diukur dengan menggunakan 4 aspek, yaitu angka harapan hidup; angka melek huruf; angka partisipasi kasar; dan indeks paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, dari tahun 2010 sampai tahun 2016, terlihat bahwa rata-rata nilai IPM Indonesia terus mengalami kenaikan. Berdasarkan tingkatan IPM yang telah dikeluarkan PBB, Indonesia merupakan negara dengan tingkat IPM menengah (*Medium Human Development Country*). Berikut adalah tabel IPM tiap-tiap Propinsi di Indonesia dari tahun 1999 sampai 2016.

Tabel 1

IPM Propinsi di Indonesia Tahun 1999-2013

Tahun	IPM	Tahun	IPM
1999	64.3	2008	71.17
2002	65.8	2009	71.76
2004	68.7	2010	72.27
2005	69.57	2011	72.77
2006	70.1	2012	73.29
2007	70.59	2013	73.81

Sumber: BPS

Dapat diamati bahwa dari tahun ke tahun Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus mengalami kenaikan. Kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Karena pembentuk IPM terdiri dari dimensi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, tiga aspek ini merupakan hal yang paling mempengaruhi IPM. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu menaikkan tiga dimensi ini.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan dalam menilai tingkat kesejahteraan. Pendapatan yang tinggi memungkinkan seseorang untuk mengakses lebih

banyak kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan demikian, tingkat pendapatan yang tinggi secara otomatis akan meningkatkan total pengeluaran rumah tangga. Maka tak heran jika ditemukan tingkat konsumsi di negara-negara maju tergolong tinggi karena efek dari pendapatan yang tinggi.

Di sisi lain, peran pemerintah dalam proses pembangunan terutama di negara-negara berkembang sangatlah penting. Salah satu peran utama pemerintah adalah menyediakan barang/fasilitas publik yang tidak akan mampu disediakan oleh pihak swasta. Pada penerapan ekonomi modern, pemerintah akan turun tangan dalam perekonomian bukan hanya sebagai pihak yang menyediakan barang publik, namun juga sebagai pihak yang mendorong pembangunan dari sisi non-ekonomi. Hal seperti ini dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu berperan dalam pembangunan ekonomi, misalkan saja dalam hal menyediakan

dan menjamin pendidikan serta kesehatan rakyatnya.

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan dilakukan utamanya untuk menaikkan derajat/kualitas kesehatan dan pendidikan. Pada akhirnya, bila kualitas kesehatan dan pendidikan dapat terus ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan, dalam jangka panjang akan mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia menjadi lebih tinggi (Rokhedi, 2015). Peningkatan produktivitas inilah yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari logika yang telah dibangun ini dapat diambil dua kesimpulan, yaitu kenaikan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah tujuan akhir yang diinginkan dari investasi bidang kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh negara.

Di lain sisi, efisiensi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan juga akan sangat menentukan peningkatan kesejahteraan rakyat (Khusnaini, 2006). Sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai

tahun 2004, daerah otonom memiliki hak dan wewenang baik dalam bidang birokrasi dan keuangan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Daerah otonom dibebaskan untuk mengelola potensi daerahnya untuk membiayai kegiatan pembangunannya sendiri. Namun pemerintah pusat masih memberikan dana transfer pusat atau sering disebut dengan dana perimbangan yang diberikan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, PAD, luas wilayah, dll.. Dalam teori *fiscal federalism* asumsi yang dipakai adalah bahwa pemerintah daerah bersifat sangat bijaksana dan akan selalu berusaha membuat keputusan-keputusan publik yang efisien dan sesuai dengan preferensi kolektif masyarakatnya (Khusnaini, 2006).

Ndakularak dkk. (2014) meneliti tentang pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi/makan, pendidikan, dan kesehatan dalam pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia 9 Kota/Kabupaten di Bali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan pendidikan berpengaruh terhadap

Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan tidak berpengaruh.

Dalam beberapa kasus, peneliti lebih menekankan pada variabel yang digunakan. Misalkan saja Wardhana (2016) yang berfokus pada pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. Selain itu penelitian ini juga memasukkan dua variabel moderasi yaitu APBD sektor pendidikan dan APBD sektor kesehatan. Hasilnya adalah ternyata kesemua variabel independen dan variabel moderasi yang digunakan dalam model penelitian tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur.

Di lain sisi, Anggraini dan Sutaryo (2015) meneliti apakah rasio-rasio keuangan sektor publik berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel independen yang digunakan adalah rasio desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efektivitas pajak

daerah. Dari semua variabel yang diteliti, hanya rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio desentralisasi yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Secara matematis, rasio ketergantungan adalah sebagai berikut (Sistianan dan Makmur, 2104).

$$RD_f = \frac{DAU + DAK + DBH}{TPD} \times 100\%$$

dengan:

RD_f = rasio desentralisasi fiskal

DAU = dana alokasi umum

DAK = dana alokasi khusus

DBH = dana bagi hasil

TPD = total penerimaan APBD

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memutuskan untuk menggabungkan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel yang dipilih adalah pengeluaran penduduk per kapita sebulan, APBD bidang kesehatan, APBD bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan daerah.

Wilayah penrlitian juga diperluas bukan hanya dalam satu provinsi atau satu pulau, akan tetapi mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jumlah observasi 198, yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2008-2013. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti BPS, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, publikasi berkala BPS, dan *website* pemerintah daerah.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 provinsi di Indonesia, sedangkan variabel independen yang dipilih adalah pengeluaran penduduk per kapita sebulan, pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan, dan rasio ketergantungan daerah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang dilakukan dengan

program *Eviews9*. Regresi data panel ini akan menghasilkan 3 kemungkinan hasil regresi yaitu model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Untuk mengetahui model mana yang paling baik dalam merepresentasikan hasil regresi akan dilakukan uji Chow dan uji Hausman.

Common Feect Model

Asusmsi utama yang digunakan adalah bahwa slope dan intersep selalu tetap baik antar individu maupun antar waktu (Sriyana, 2014). Bentuk umum dari persamaan model *common effect* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} : IPM
- β_0 : konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien X_1, X_2, X_3, X_4
- $\ln X_{lit}$: log dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk

$\ln X_{2it}$: log dari pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan

$\ln X_{3it}$: log dari pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan

X_{4it} : rasio kemandirian daerah

ε_{it} : variabel gangguan (*error*)

Fixed Effect Model

Random effect memiliki asumsi bahwa intersep antar individu maupun antar waktu saling berbeda untuk masing-masing objek observasi, meskipun slop masih dianggap sama. Dikarenakan adanya perbedaan intersep antar unit, perbedaan ini diakomodasi dengan pembentukan variabel *dummy* (boneka) yang menjelaskan perbedaan lintas unit. Secara umum, persamaan regresi dari model *fixed effect* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \sum_{k=1}^{n=33} \alpha_k D_{ki} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

α_k : intersep variabel *dummy* dari masing-masing provinsi
 D_k : variabel *dummy* dari masing-masing provinsi

ϵ_{it} : variabel gangguan (*error*)
 μ_i : variabel gangguan yang bersifat random
 v_i : $\epsilon_{it} + \mu_i$

Random Effect Model

Dalam model *random effect* perbedaan intersep antar individu dan antar waktu disebabkan oleh residual/*error* yang terjadi secara random. Model *random effect* ini menggunakan teknik *generalized least square* (GLS). Nilai titik potong β_0 menjelaskan nilai rata-rata semua titik potong *cross section* dan komponen *error* (ϵ_0) menjelaskan deviasi titik potong rata-rata anggota panel (Manurung dkk., 2005). Secara umum, persamaan regresi dari model *random effect* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \bar{\beta}_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \sum_{k=1}^n \alpha_k D_{ki} + (\epsilon_{it} + \mu_i)$$

$$Y_{it} = \bar{\beta}_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \sum_{k=1}^n \alpha_k D_{ki} + v_i$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan regresi, diperoleh 3 model dari data panel yang kemudian akan dipilih satu model yang paling tepat. Berdasarkan uji Chow dan Hausman, dapat dilihat bahwa model *fixed effect* merupakan model yang paling tepat digunakan. Berikut adalah hasil dari uji Chow dan uji Hausman.

Tabel 2

Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Uji Chow		
Effects Test	Statistic	d.f.
Cross-section F	387.145052	(32,161)
Uji Hausman		
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.
Cross-section random	14.595548	4

Dari hasil uji Chow diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 387,145052 nilai *F-kritis* sebesar 1,525. Karena nilai *F-statistic* > *F kritis*, kesimpulannya

adalah bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dibanding dengan model *common effect*. Selanjutnya adalah melihat apakah model *random effect* lebih tepat dari pada *fixed effect* dengan menggunakan uji Haussman. Hasil uji Haussman *Chi-Sq. Statistic* sebesar 13,774997 dengan alpha 5% maka nilai Chi Squares kritis 7,77943. Karena nilai *Chi-Sq. Statistic* > Chi Squares kritis, maka kesimpulannya adalah bahwa model *fixed effect* merupakan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

Dari hasil regresi data panel dengan model *fixed effect* diperoleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 3
Hasil Estimasi Fixed Effect

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	27.33556	13.39250	0.0000
LOG(X1?)	2.946883	18.80907	0.0000
LOG(X2?)	0.248180	3.339738	0.0010
LOG(X3?)	0.009883	0.149645	0.8812
X4?	-0.014688	-3.889578	0.0001
R-squared	0.993740		
F-statistic	709.9908		

Nilai koefisien determinasi (R^2) 0,993792 atau 99,3792% yang artinya bahwa 99,3792% dari variasi IPM di 33 Provinsi di Indonesia dapat dijelaskan

oleh variabel-variabel independen yang dipilih dalam model dan sisanya (0,6208%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dari hasil estimasi diperoleh nilai *F-statistic* adalah 713,5561 ($\alpha=5\%$) dan F kritisnya 1,49059 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa secara bersama-sama semua variabel independen dalam model.

Dari keempat variabel independen yang diteliti, terlihat bahwa hanya variabel pengeluaran pemerintah saja yang tidak berpengaruh terhadap IPM (ditunjukkan dengan nilai t-statistik < t kritis). Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta (Badrudin dan Khasanah, 2011) juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM daerah.

Variabel pengeluaran rata-rata penduduk per kapita per bulan dan pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM. Variabel rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM di Indonesia. Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhakti dkk. (2014) yang

menunjukkan bahwa APBD sektor kesehatan berpengaruh positif serta rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan IPM daerah.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam model *fixed effect* akan diperoleh koefisien dari variabel *dummy* sebagai pembeda antar data *cross section*. Hasil estimasi model ini diperoleh koefisien *dummy* dari 33 provinsi seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4

Koefisien *Dummy* Tiap Provinsi

Provinsi	Intersep	Peringkat
Aceh	-0.751327	25
Bangka Belitung	0.658843	13
Bali	-0.526508	24
Bengkulu	-2.230045	10
Banten	1.53176	16
DI Yogyakarta	3.868106	2
DKI Jakarta	2.519115	5
Gorontalo	0.023291	17
Jawa Barat	-0.320714	21
Jambi	1.246754	12
Jawa Tengah	0.611823	14
Jawa Timur	-0.481769	23
Kalimantan Barat	-2.409521	28
Kalimantan Selatan	-2.666786	29

Kalimantan Tengah	2.751702	4
Kalimantan Timur	2.291177	7
Kepulauan Riau	2.485221	6
Lampung	-0.037063	18
Maluku	0.484434	15
Maluku Utara	-1.946872	27
Nusa Tenggara Barat	-5.476776	32
Nusa Tenggara Timur	-2.995861	31
Papua Barat	-2.88764	30
Papua	-7.292964	33
Riau	3.40261	3
Sumatera Barat	1.586875	9
Sulawesi Barat	-0.298384	22
Sulawesi Tenggara	-0.840252	26
Sulawesi Selatan	-0.126503	18
Sulawesi Tengah	-0.081289	19
Sulawesi Utara	4.561758	1
Sumatera Selatan	1.291379	11
Sumatera Utara	2.055429	8

Tercatat 3 provinsi yang memiliki koefisien *cross section* paling tinggi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara (4,561758), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3,868106), dan Provinsi Riau (3,40261). Sedangkan 3 provinsi dengan koefisien *dummy* paling rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Papua dengan nilai koefisien *cross section* berurut-turut -2,995861; -5,476776; -7,292964.

Bila diamati lebih lanjut, 3 provinsi dengan kemampuan terendah dalam meningkatkan IPM merupakan provinsi yang berada di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Hal seperti ini sangatlah masuk akal mengingat tingkat konsentrasi pembangunan yang dilakukan pemerintah juga cenderung rendah di kawasan ini. Rendahnya perhatian pemerintah mengakibatkan lambatnya perkembangan di segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk infrastruktur dan ketersediaan fasilitas yang masih sangat terbatas. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang rendah karena tekanan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll..

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti bahwa saat pengeluaran per kapita sebulan penduduk naik, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan mengalami peningkatan.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya bahwa saat pemerintah provinsi menaikkan anggaran belanja di bidang kesehatan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi yang bersangkutan.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya adalah saat pemerintah provinsi menaikkan anggaran belanja bidang pendidikan

maka tidak akan mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini menunjukkan bahwa bila rasio ketergantungan daerah suatu provinsi naik, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Rinda Ayun dan Luthfi Muta'ali (), "Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011", *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 2, Nomor 3.

Arsyad, Licolin (2004), "Ekonomi Pembangunan (Edisi Keempat)", UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah (2011), "Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah

Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Buletin Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1, 1-82.

Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto (2016), "Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews", PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Bhakti, Nadia Ayu; Istiqomah; dan Suprpto (2014), "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vololume 18, No. 4, 452-469.

Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto (2010), *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, Ganec Swara Edisi Khusus, Volume 4, Nomor 3.

- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter (2015), “Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi 5 - Buku 2)”, Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Riva Ubar (2011), “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volum 11, Nomor 1.
- Manik, Tumpal (2013), “Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, *Intergovernmental* Revenue, dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 9, Nomor 2, 107-124.
- Manurung, Jonni J.; Alder Haymans Manurung; dan Ferdinand Dehoutman Saragih (2005), “Ekonometrika: Teori dan Aplikasi”, PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Ndakularak, Erwin; Nyoman Djinar Setiawina; dan I Ketut Djayastra (2014), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Volume 03, Nomor 03.
- Santoso, Rokhedi Priyo (2012), “Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan”, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Setiawan, Muhammad Bhakti dan Abdul Hakim (2013), “Indeks Pembangunan Manusia Indoensia”, *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1.
- Sriyana, Jaka (2014), “Metode Regresi Data Panel”, Ekonisia, Yogyakarta.
- Wardana, Dedy Pudja (2016), “Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur”, *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Volume 12, Nomor 2.